

Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Masyarakat Kecamatan Rumbai Pesisir Oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru

Muhammad Akbar Utama¹ Hendry Andry²

Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Islam Riau, Jl. Kharudin Nasution
No. 133 Perhentian Marpoyan, Pekanbaru, Indonesia
muhammadakbarutama@student.uir.ac.id hendryandry@soc.uir.ac.id

Received : July 30, 2024;

Accepted : 30 Juli 2024

Abstract

The aim of this research is to analyze the process of managing household waste in the Rumbai Pesisir District community by the Pekanbaru City Environment and Hygiene Service and to find out what obstacles the Pekanbaru City Environment and Hygiene Service has in managing waste at the Rumbai Pesisir TPS. The research method used in this research is a qualitative descriptive research method. Meanwhile, the data analysis used is analysis consisting of three activity streams that occur simultaneously, namely: data reduction, data presentation, drawing conclusions/verification. Based on the research results, it is known that the planning carried out by the Pekanbaru City Environment and Hygiene Service is considered not optimal, this can be seen from the lack of law enforcement against transport that dumps waste at the Rumbai Pesisir TPS. The division of tasks has been carried out by the Pekanbaru City Environment and Hygiene Service but it is based on sub-districts, not based on existing polling stations. The Head of the Pekanbaru City Environment and Hygiene Service has given assignment orders to employees at the Pekanbaru City Environment and Hygiene Service.

Keywords: *Analysis, Waste Management, Pekanbaru City*

Abstrak

Tujuan penelitian ini untuk menganalisis proses Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Masyarakat Kecamatan Rumbai Pesisir Oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru dan untuk mengetahui apa saja hambatan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru dalam pengelolaan sampah di TPS Rumbai Pesisir. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode penelitian diskriptif kualitatif. Sementara itu, analisis data yang digunakan yaitu analisis terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu: reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan/verifikasi. Berdasarkan hasil penelitian diketahui perencanaan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru dinilai belum maksimal hal ini dilihat dari belum adanya penegakan hukum terhadap angkutan yang membuang sampah di TPS Rumbai Pesisir. Pembagian tugas sudah dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru tetapi itu berdasarkan Kecamatan bukan berdasarkan TPS yang ada. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru sudah memberikan Surat Perintah Tugas kepada pegawai yang ada di Dinas lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru

Kata Kunci: *Analisis, Pengelolaan Sampah, Kota Pekanbaru*

Pendahuluan

Muhammad Akbar Utama dan Hendry Andry

Journal of Public Administration Review Vol. 1 No. 1 / 2024

812

Administrasi adalah merupakan keseluruhan proses kerjasama antara dua orang atau lebih. Yang didasarkan oleh rasionalitas tertentu dalam rangka pencapaian tujuan yang ditentukan sebelumnya dengan memanfaatkan saran dan prasarana tertentu secara berdaya guna dan hasil guna Siagian (Zulkifli,2005;20), administrasi dan manajemen merupakan sebagai ilmu dan seni dalam pengelolaan dan mengatasi permasalahan dalam organisasi yang mana terdapat sekelompok orang yang bekerjasama untuk mencapai suatu tujuan.

Pada setiap organisasi public dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran secara berhasil guna dan berdaya guna memerlukan adanya pe, bagian kerja, pelimpahan wewenang sampai kepada rincian tugas secara jelas disetap disetiap masing – masing pihak yang organisasi tersebut. Disamping itu, dalam suatu organisasi harus ditetapkan pula kaitan kerjasama antara satu aspek dengan aspek lainnya, untuk dijadikan pegangan bagi para pelaksana, agar proses pelaksanaannya dapat berjalan secara sistematis.

Kota Pekanbaru sebagai ibu kota Provinsi Riau berfungsi sebagai pusat pemerintahan Provinsi Riau, Pusat Pendidikan, Pusat Perdagangan, Industry dan Jasa. Pekanbaru saat ini memiliki perkembangan yang cukup pesat, perkembangan tersebut terlihat dari tumbuhnya pusat-pusat perdagangan moderen dan tradisional, selain di pusat kota juga tersebar di kecamatan-kecamatan dalam kota pekanbaru. Secara administratif Kota Pekanbaru memiliki 12 Kecamatan dan 58 Kelurahan/Desa.

Kebersihan merupakan hal utama yang harus di perhatikan oleh pemerintah maupun masyarakat di setiap kota karena kebersihan merupakan cerminan keindahan dari sebuah kota. Oleh sebab itu, pemerintah kota perlu menangani secara serius persoalan kebersihan khususnya penanganan masalah sampah. Permasalahan sampah tidak pernah ada habisnya dan menjadi persoalan serius terutama di kota-kota besar di Indonesia.Sampah merupakan konsep buatan manusia, dalam proses-proses alam tidak ada sampah, yang ada hanya produk- produk yang tak bergerak. Sampah dapat berada pada setiap fase/materi, yaitu fase padat, cair, atau gas. Ketika di lepaskan dalam fase cair dan gas, terutama dalam fase gas sampah ini di sebut sebagai emisi berkait dengan polusi. Bila sampah masuk ke dalam lingkungan (ke air, ke udara dan ke tanah) maka kualitas lingkungan akan menurun.

Peristiwa masuknya sampah ke lingkungan inilah yang di kenal sebagai peristiwa pencemaran lingkungan. Masalah persampahan merupakan sebuah tantangan yang akan menentukan sustainability lingkungan suatu kota. Kegagalan menangani problem persampahan ini akan meningkatkan resiko warga kota berhadapan dengan berbagai macam penyakit yang akan meningkatkan biaya sosial untuk kesehatan. Selain itu sampah yang di buang ke sungai dan saluran pembuangan berpotensi menimbulkan banjir.Kelompok pertama yang paling di rugikan adalah masyarakat miskin. Alasan tersebut menyebabkan pemerintahan kota berkewajiban menyediakan sistem pengolahan yang efektif, efisien dan terjangkau.Sampah merupakan sisa-sisa kegiatan sehari-hari manusia atau proses alam yang berbentuk padat berupa zat organik atau anorganik yang bersifat dapat terurai atau tidak dapat terurai yang dianggap sudah tidak berguna lagi dan di buang ke lingkungan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga serta didukung melalui Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pelaksanaan Reduce, Reuse dan Recycle melalui Bank Sampah, maka aparat pemerintah dan masyarakat dapat bekerja sama dalam melaksanakan pengelolaan sampah

untuk mewujudkan lingkungan yang bersih dan sehat. Dengan diterapkannya kedua peraturan ini, maka kebijakan pengelolaan sampah yang selama ini hanya bertumpu pada pendekatan kumpul, angkut, buang dengan mengandalkan keberadaan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA), diubah dengan pendekatan *reduce at source* dan *resource recycle* melalui penerapan 3R (*Reduce, Reuse dan Recycle*). Oleh karena itu seluruh lapisan masyarakat diharapkan mengubah paradigmanya terhadap sampah, yaitu memandang sampah sebagai sesuatu yang memiliki nilai guna dan manfaat, sehingga dapat memperlakukan sampah sebagai sumber daya alternatif yang dapat dimanfaatkan kembali, baik secara langsung, proses daur ulang, maupun proses lainnya.

Untuk menindaklanjuti Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2012 dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2012 maka Pemerintah Kota Pekanbaru juga akan melaksanakan program 3R terhadap sampah. Hal ini dibuktikan dengan telah dikeluarkannya Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah, diamanatkan bahwa pengelolaan kebersihan merupakan tanggung jawab Pemerintah Daerah, dalam hal ini dilaksanakan oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Pekanbaru serta Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) lainnya. Dalam Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2014 pasal 6 menyatakan Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan dalam pengelolaan sampah yaitu :

- a. Menetapkan kebijakan dan strategi dalam pengelolaan sampah berdasarkan kebijakan nasional dan provinsi.
- b. Menyelenggarakan pengelolaan sampah sesuai dengan norma, standarisasi, prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah.
- c. Melakukan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain.
- d. Menetapkan lokasi Tempat Penampungan Sementara (TPS), Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST) dan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA).
- e. Melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala setiap 6 bulan selama 20 tahun terhadap Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) dengan sistem pembuangan terbuka yang telah ditutup.
- f. Menyusun dan menyelenggarakan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah sesuai dengan kewenangannya.

Kebijakan mengenai pengelolaan sampah yang dilakukan oleh pemerintah selama ini dapat dikatakan kurang efektif. Pengelolaan sampah yang dilakukan masih berorientasi pada penyelesaian pembuangan sampah, hal ini dikarenakan belum adanya perencanaan sistem pengelolaan sampah yang profesional. Permasalahan sampah masih belum mendapatkan perhatian dalam hal kebijakan dibandingkan dengan permasalahan lain dalam perkembangan dan pembangunan kota. Selain itu, sebagian besar masyarakat belum memahami pengelolaan sampah yang baik, padahal peran serta masyarakat dibutuhkan dalam sistem pengelolaan sampah, sehingga jika dapat berjalan dengan apa yang diharapkan maka Bank Sampah akan menjadi suatu solusi nyata dalam pengelolaan sampah di Kota Pekanbaru.

Masih jauh dari memadai apabila diukur dari sistem dan metode pengelolaan sampah yang efektif, aman, sehat, ramah lingkungan dan ekonomis. Seringkali terlihat suatu pemandangan dimana sampah dibuang oleh masyarakat sekitarnya ataupun orang yang tinggal jauh dari lingkungan tersebut yang sengaja membuang sampah di suatu tempat padahal tempat tersebut bukan merupakan tempat pembuangan sampah, sehingga menjadi tempat pembuangan sampah liar di Kota Pekanbaru, salah satunya pada tempat pembuangan sampah sementara (TPS) di Kecamatan Rumbai Pesisir.

Pembuangan dengan cara timbunan terbuka di TPA (open dumping) adalah bentuk pengolahan umum yang ditemui di Indonesia. Apabila pengelolaan sampah masih dilakukan dengan cara ini, maka dapat diperkirakan kotakota di Indonesia akan mengalami permasalahan sampah yang akan berdampak buruk bagi kehidupan. Untuk mencapai masyarakat perkotaan yang sejahtera, kualitas lingkungan hidupnya harus baik, karena akan berpengaruh pada kualitas hidupnya (quality of life).

Pengelolaan sampah konvensional sistem open dumping yang menumpukkan sampah di tempat terbuka pada TPA bukanlah merupakan pilihan yang ramah lingkungan karena membiarkan gas methane dan air lindi mencemari lingkungan sekitarnya. Apalagi penanganan yang terpusat (sentralisasi) pada TPA membuat jalur pengangkutan lebih panjang dan kurang efisien. Selain itu juga sarana dan prasarana pengelolaan sampah yang tidak memadai sehingga menyebabkan kurang optimal bekerjanya pengelola sampah dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru.

Namun ada hal lain yang membuat penulis mempertimbangkan untuk penentuan lokasi penelitian ini. Dan tentu wilayah yang dimana menjadi langganan banjir dan daerah pinggiran sungai menimbulkan permasalahan yang lebih khusus dalam perihal penanganan sampah itu sendiri.

fenomena - fenomena yang yang penulis temukan dalam pra survey adalah, Tidak bertepatan waktu pembuangan sampah oleh masyarakat Kota Pekanbaru dengan pengangkutan sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru, Kurangnya pembinaan dan pengawasan kerja Dinas Kebersihan dalam pengelolaan sampah yang dilakukan oleh pihak pengelola. Baik itu pihak ketiga (swasta) atau pekerja dari dinas itu sendiri, Indikasi kurangnya sarana dan prasarana yang ada pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru.

Tinjauan Pustaka

Pengelolaan adalah "manajemen". Manajemen adalah kata yang aslinya dari bahasa Inggris yaitu "management", yang berarti keterlaksanaan, tata pimpinan, pengelolaan manajemen atau pengelolaan dalam pengertian umum menurut suharismiarikunto adalah pengadministrasian, pengaturan, atau penataan suatu kegiatan.¹ Namun kata management sendiri sudah diserap kedalam bahasa Indonesia menjadi kata manajemen yang berarti sama dengan "pengelolaan", yakni sebagai suatu proses mengoordinasi dan mengintegrasikan kegiatan-kegiatan kerja agar dapat diselesaikan secara efisien dan efektif.

Adapun indikator pengelolaan menurut George Terry (2014:53) yaitu:

1. Perencanaan adalah proses yang menyangkut upaya yang dilakukan untuk mengantisipasi kecenderungan dimasa yang akan datang dan penentuan strategi serta taktik yang tepat untuk mewujudkan target dan tujuan organisasi.
2. Pengorganisasian adalah proses yang menyangkut bagaimana strategi dan taktik yang telah dirumuskan dalam perencanaan yangb didesain dalam struktur organisasi yang tepat dan tangguh, sistem dan lingkungan organisasi yang kondusif, dan bisa memastikan bahwa semua pihak dalam organisasi bisa bekerja secara efektif dan efisien guna pencapaian organisasi.
3. Pengarahan adalah tindakan yang mengusahakan agar seseorang atau kelompok mau bekerja sama dengan senang hati untuk melakukan tugas pekerjaannya, sesuai dengan tugas dan wewenang, untuk mencapai tujuan yang dikehendaki secara efektif.
4. Pengawasan adalah proses pengamatan dari pada pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya.

Metode

Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian diskriptif kualitatif, karena dalam mengkaji permasalahan, peneliti tidak membuktikan ataupun menolak hipotesis yang dibuat sebelum penelitian tetapi mengolah data dan menganalisis suatu masalah secara non numerik. Metode Kualitatif untuk menguji hipotesis/teori (Sugiyono, 2016: 38). Berdasarkan rangkaian teori tentang penelitian kualitatif tersebut, karena jenis penelitian ini memusatkan pada deskripsi data yang berupa kalimat-kalimat yang memiliki arti mendalam yang berasal dari informan dan perilaku yang di amati. Data hasil penelitian ini berupa fakta-fakta yang ditemukan pada saat di lapangan oleh peneliti (Sugiyono, 2016). Design penelitian yang digunakan adalah studi kasus tunggal holistik, Menurut Yin (2015: 18) penelitian studi kasus merupakan inkuiri empiris yang menyelidiki fenomena di dalam konteks kehidupan nyata, bilamana batas-batas antara fenomena dan konteks tak tampak dengan tegas; dan dimana : multi sumber bukti dimanfaatkan.

Hasil dan Pembahasan

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan indicator dari pengelolaan menurut) George Terry (2014:53).

Perencanaan (Planning)

Perencanaan (Planning) adalah pemilihan fakta-fakta dan usaha menghubungkan fakta satu dengan lainnya, kemudian membuat perkiraan dan peramalan tentang keadaan dan perumusan tindakan untuk masa yang akan datang yang sekiranya diperlukan untuk mencapai hasil yang dikehendaki. Perencanaan juga diartikan sebagai proses penentuan tujuan dan pedoman pelaksanaan, dengan memilih yang terbaik dari alternatif-alternatif yang ada.

Dari penegasan teori tersebut menimbulkan variabel beberapa pertanyaan yang menyangkut kepada penyusunan evaluasi/ review informasi yang ada terkait, prosedur serta kebijakan dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Masyarakat Kecamatan Rumbai Pesisir

Oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru. Berdasarkan wawancara dengan Hendra Apriadi MH Kabid Pengeolaan Sampah, beliau mengatakan bahwa :

“Jelas, kami selaku khusus yang bertugas dalam Bidang pengelolaan sampah ini sudah tentu mempersiapkan serta mengevaluasi bagaimana pengelolaan sampah di TPS Rumbai Pesisir tersebut hal ini dilakukan agar tidak ada lagi sampah yang menumpuk begitu banyak disana. Prosedur pengelolaan sampah yang kami lakukan ya melakukan pengangkutan sampah dari TPS tersebut ke TPA 2 Muara Fajar itu dilakukan pada pagi hari sehingga dengan begitu tidak ada lagi sampah yang menumpuk disana pada siang harinya. Kebijakan dalam pengelolaan sampah ini sudah jelas, saya selaku Kabid Bidang Pengelolaan Sampah sudah melakukan diskusi dengan Kepala Dinas sehingga sudah ada putusan atau Himbauan dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru kepada seluruh masyarakat Kota Pekanbaru bahwa masyarakat dianjurkan untuk membuang sampah di TPS Rumbai Pesisir tersebut mulai dari jam 19.00 Wib sampai dengan jam 05.00 Wib. Hal ini untuk mencegah adanya sampah yang bertumpukan di TPS Rumbai Pesisir pada siang hingga sore harinya”.

Berdasarkan observasi yang dilakukan peneliti terhadap Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Masyarakat Kecamatan Rumbai Pesisir Oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru dilihat dari indikator pertama yakni perencanaan, peneliti menemukan bahwa isu atau informasi terkait pencemaran lingkungan/ penumpukan sampah di TPS Rumbai Pesisir sudah diketahui secara lengkap oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru. Tetapi belum ada inovasi prosedur pengelolaan sampah yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru sehingga sampai saat ini selalu ada sampah yang berserakan di TPS Rumbai Pesisir. Penegakan hukum terhadap angkutan liar yang membuang sampah di TPS Rumbai Pesisir sudah pernah dilakukan pada tahun 2021 dan itu cukup berhasil hanya saja permasalahan anggaran yang disediakan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru tidak mencukupi sehingga Tim Penegakan Hukum tersebut harus dibubarkan atau kegiatan tersebut di hapuskan.

Pengorganisasian (organizing)

Pengorganisasian (Organizing) diartikan sebagai kegiatan mengaplikasikan seluruh kegiatan yang harus dilaksanakan antara kelompok kerja dan menetapkan wewenang tertentu serta tanggung jawab sehingga terwujud kesatuan usaha dalam pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Organizing (Pengorganisasian) adalah suatu proses penentuan, pengelompokan, dan pengaturan bermacam-macam aktivitas yang diperlukan untuk mencapai tujuan, menempatkan orang-orang pada setiap aktivitas ini, menyediakan alat-alat yang diperlukan, menetapkan wewenang yang secara relatif didelegasikan kepada setiap individu yang akan melakukan aktivitas- aktivitas tersebut.

Dari penegasan teori tersebut menimbulkan variabel beberapa pertanyaan yang menyangkut kepada pembagian tugas dan kerjasama dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Masyarakat Kecamatan Rumbai Pesisir Oleh Dinas Lingkungan Hidup dan

Kebersihan Kota Pekanbaru. Berdasarkan wawancara dengan Hendra Apriadi MH Kabid Pengeolaan Sampah, beliau mengatakan bahwa :

“Pembagaian tugas yang dimaksud ini bukan untuk di TPS Rumbai Pesisir saja sebenarnya. Kami dari Bidang pengelolaan sampah membagi tugas berdasarkan zona masing-masing. TPS Rumbai Pesisir itu kandi Kecamatan Rumbai jadi kami menugaskan pegawai itu perkecamatan untuk mengawasi wilayah yang rentan banyak sampah. Untuk TPS Rumbai Pesisir sendiri kami menugaskan 3-4 orang Tenaga Harian Lepas yang bertugas di penyapuan. Permasalahan kerjasama dengan pihak swastapun sudah kami lakukan tetapi kami berugas di zona kami masing-masing. Kerjasama tersebut dengan PT. Godang Tua Jaya dan PT. Sahamna Indah. Jadi yang bertanggungjawab atas kebersihan TPS Rumbai Pesisir tersebut ialah PT. Godang Tua Jaya”.

Berdasarkan observasi yang dilakukan peneliti terhadap Analisis Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Masyarakat Kecamatan Rumbai Pesisir Oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru dilihat dari indikator kedua yakni pengorganisasian, peneliti menemukan informasi bahwa belum ada pegawai atau THL yang ditugaskan secara khusus untuk melakukan pengelolaan sampah di TPS Rumbai Pesisir. Tugas yang diberikan kepada pegawai yaitu penyapu bukan ditugaskan untuk pengelolaan sampah di TPS Rumbai Pesisir. Keterlambatan kerjasama yang dilakukan oleh pihak dinas dengan pihak swasta karena banyak terdapat kesalahan dalam dokumen lelang yang dibuat oleh pegawai Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru sehingga terjadi beberapa kali revisi dokumen lelang kerjasama pengelolaan sampah.

Pengarahan (Actuating)

Pengarahan (Actuating) adalah menempatkan semua anggota daripada kelompok agar bekerja secara sadar untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan sesuai dengan perencanaan dan pola organisasi. Pengarahan adalah mengarahkan semua bawahan, agar mau bekerja sama dan bekerja efektif untuk mencapai tujuan.

Dari penegasan teori tersebut menimbulkan variabel beberapa pertanyaan yang menyangkut kepada Surat Perintah Tugas dari Kepala Dinas dan pembagian tugas khusus di Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru. Berdasarkan wawancara dengan Hendra Apriadi MH Kabid Pengeolaan Sampah, beliau mengatakan bahwa :

“Kalau masalah surat perintah tugas sudah jelas ada dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru, kalau tidak ada SPT maka kami tidak akan bisa bekerja. Sebenarnya memang SPT itu hanya pelengkap administratif, tetapi dengan adanya SPT tersebut maka apa yang akan kami kerjakan akan lebih terarah apa saja yang harus kami laporkan kepada Kepala Dinas. Permasalahan pembagian tugas khusus menurut saya sudah bisa dikatakan ada karena kami sudah menugaskan beberapa orang pegawai dan THL dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru kami berikan tugas membersihkan pasar dan wilayah di sekitar TPS Rumbai Pesisir tersebut”.

Berdasarkan observasi yang dilakukan peneliti terhadap Analisis Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Masyarakat Kecamatan Rumbai Pesisir Oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru dilihat dari indikator ketiga yakni pengarahan, peneliti menemukan informasi bahwa sudah adanya Surat Perintah Tugas (SPT) dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru. Tetapi dalam pelaksanaannya

masih banyak yang tidak sesuai dengan SPT tersebut. Belum ada pegawai atau THL yang ditugas khusus untuk mengelola TPS Rumbai Pesisir tersebut, yang ada hanya tenaga penyapu.

Pengawasan (Controlling)

Pengawasan (Controlling) diartikan sebagai proses penentuan yang dicapai, pengukuran dan koreksi terhadap aktivitas pelaksanaan dan bilamana perlu mengambil tindakan korektif terhadap aktivitas pelaksanaan dapat berjalan menurut rencana. Pengawasan adalah proses pengaturan berbagai faktor dalam suatu perusahaan, agar sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam rencana.

Dari penegasan teori tersebut menimbulkan variabel beberapa pertanyaan yang menyangkut kepada pemantauan, sarana dan prasarana serta penegakan hukum dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru. Berdasarkan wawancara dengan Hendra Apriadi MH Kabid Pengeolaan Sampah, beliau mengatakan bahwa :

“Jelas, semua pegawai yang ditugaskan langsung turun kelapangan dan saya sendiripun sering melakukan pemantauan terhadap wilayah-wilayah rentan banyak tumpukan sampah. Kan sudah sayakatakan tadi tidak ada armada yang ditugaskan khusus untuk rumbai pesisir yang ada hanya tugas sesuai zona masing-masing jadi itu sudah termasuk. Penegakan hukum memang belum ada karena kami masih kekurangan anggran untuk merekrut tenaga penegak hukum sehingga belum ada penegakan hukum terhadap angkutan mandiri yang membuang sampah di TPS Rumbai Pesisir tersebut”.

Berdasarkan observasi yang dilakukan peneliti terhadap Analisis Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Masyarakat Kecamatan Rumbai Pesisir Oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru dilihat dari indikator keempat yakni pengawasan, peneliti menemukan informasi bahwa tidak ada pegawai yang turun lapangan untuk memantau atau mengawasi TPS Rumbai Pesisir, dan tidak ada juga penegakan hukum yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru.

Berdasarkan hasil tanggapan informan bahwa belum ada pengawasan secara rutin yang dilakukan oleh pegawai Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru di TPS Rumbai Pesisir. Tidak ada angkutan secara khusus bertugas mengangkut sampah dari TPS Rumbai Pesisir dan juga belum ada penegakan hukum dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Masyarakat Kecamatan Rumbai Pesisir Oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru., maka dapat diambil kesimpulan dari penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Timbulan sampah yang dibuang oleh masyarakat di TPS Pasar Simpang Baru 92,15 m³ atau persentase nya mencapai 65% per hari.
2. Regulasi yang menyangkut tentang pengangkutan hanya sekedar administrasi saja tetapi minim tindakan di lapangan.

3. Tidak adanya pegawai atau THL yang dituaskan untuk mengawasi dan mengelola sampah tersebut dan kurangnya kesigapan dinas secara administratif mengakibatkan mundurnya jadwal kerjasama antara dinas dan pihak swasta.
4. Hambatan Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Masyarakat Kecamatan Rumbai Pesisir Oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru: Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru masih kekurangan anggaran untuk merekrut Tim Satgas Penegakan Hukum terhadap angkutan liar dan bentor yang membuang sampah di TPS Rumbai Pesisir, Kurangnya sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru, Masyarakat di sekitar TPS Rumbai Pesisir tidak mau andil bagian dalam membantu Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru dalam mensterilkan TPS, Belum adanya angkutan yang khusus untuk mengangkut sampah yang ada di TPS Rumbai Pesisir.
5. Tidak tersedianya angkutan khusus yang bertugas mengangkut sampah di TPS Rumbai Pesisir dan tidak terdapat penegakan hukum dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru.

Daftar Pustaka

Buku dan Jurnal:

- Abdul Wahab, Solichin, 2008, Analisis Kebijakan dari formula ke Implementasi. Kebijakan Negara, Jakarta : Pt. Bumi Aksara.
- Andry, H. (2015). Perilaku dan Etika Administrasi Publik. Pekanbaru: MarpoyanTujuh.
- Adisasmita, Rahardjo. (2011). Manajemen Pemerintah Daerah. Yogyakarta: Penerbit Graha Ilmu.
- Agustino, Leo. (2014). Dasar-Dasar Kebijakan Publik. Bandung: CV. Alfabeta.
- Atmosudirdjo, Prajudi. 2005. Manajemen Dasar Pengertian dan Masalah. Malayu: Rineka Cipta.
- Badrudin. 2015. Dasar - Dasar Manajemen. Bandung: Alfabeta
- Djarmiko, Yayat Hayati. 2005. Perilaku Organisasi. Bandung: Alfabeta
- Hasibuan, Malayu. 2003. Organisasi dan Motivasi. Jakarta: Bumi Aksara
- Herlambang, Susatyo. 2013. Pengantar Manajemen. Yogyakarta: Gosyen Publishing
- Kartono, Kartini. 2014. Pemimpin Dan Kepemimpinan. Jakarta: Rajawali Pers
- Kodarni. 2013. Bahan Ajar Manajemen. UIN Suska Riau Pekanbaru
- Mustopadijaja, AR. (2003). Sankri buku 1 Prinsip-prinsip Penyelenggaraan Negara. Jakarta: Gunung Agung.
- Nawawi, Zaidan. 2013. Manajemen Pemerintahan. Jakarta: Rajawali Pers
- Pasolong, Harbani. 2010. Teori Administrasi Publik. Bandung: Alfabeta
- Rasidah & Ambar Teguh. 2009. Manajemen Sumber Daya Manusia. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Sabardi, Agus. 2001. Manajemen Pengantar. Yogyakarta: UPP AMP YKPN

Sari, Dewi. 2013. *Evaluasi Administrasi*. Semarang: Kencana

Handrian, E., & Andry, H. (2020). Sustainable Development Goals: Tinjauan Percepatan Pencapaian di Provinsi Riau. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 6(1), 77-87.

Handrian, E., Muslikhah, U., & Rosmita, R. (2024). Diffusion of Application Policy Innovation Pekan Kita (PEKA) in Pekanbaru City. *Jurnal Administrasi Publik*, 15(1).

Andry, H., & Handrian, E. (2017, November). E-Implementation of E-Government In Regional Financial Management (Study at the Regional Finance and Asset Management Board of Riau Province). In *International Conference on Democracy, Accountability and Governance (ICODAG 2017)* (pp. 152-155). Atlantis Press.

Handrian, E., Rosmita, R., & Suriani, L. (2023). Inclusive Development for Marginal Group Street Trader in Tembilahan Indragiri Hilir District. *Jurnal Administrasi Publik*, 14(1).

Handrian, E. (2019). Pengaruh Reformasi Birokrasi Terhadap Kualitas Pelayanan Pembuatan Surat Izin Mengemudi Golongan C (Sim C) Pada Sat Lintas Polresta Pekanbaru. *Publika: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 5(1), 137-155.

Handrian, E., & Andry, H. (2020). Penguatan Pemerintahan Daerah Dalam Pengelolaan Kawasan Perbatasan Di Kabupaten Kepulauan Meranti. *Jurnal Kemunting*, 1(2), 183-203.

Handrian, E., & Hawa, S. (2022). Implementasi program pengembangan perikanan tangkap pada Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru. *JIAP (Jurnal Ilmu Administrasi Publik)*, 10(1), 49-58.

Nurman, Yusriadi, Y., & Hamim, S. (2022). Development of pluralism education in Indonesia. *Journal of Ethnic and Cultural Studies*, 9(3), 106-120.

Nasri, H., Nurman, N., Azwirman, A., Zainal, Z., & Riauan, I. (2022). Implementation of collaboration planning and budget performance information for special allocation fund in budget planning in the regional development planning agency of Rokan Hilir regency. *International Journal of Health Sciences (IJHS) Ecuador*, 6(S4), 639-651.

Nurman, N., Zainal, Z., & Rajasa, Y. (2021). Good Governance in Structure Belantik Raya People's Market in Siak District. *Jurnal Kajian Pemerintah: Journal of Government, Social and Politics*, 7(2), 1-11.

Nurman, M. P. (2015). *Strategi Pembangunan Daerah*.

Rusli, R., & Nurman, N. (2016). Implementasi Fungsi Koordinasi Camat Dalam Pembuatan Kartu Keluarga Dan Kartu Tanda Penduduk Di Kecamatan Dumai Barat Kota Dumai. *Jurnal Kajian Pemerintah: Journal of Government, Social and Politics*, 2(1), 27-39.

Parjiyana, P. (2015). Implementasi Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 128 Tahun 2004 Tentang Kebijakan Dasar Pusat Kesejatan Masyarakat. *Jurnal*

Kajian Pemerintah: Journal of Government, Social and Politics, 1(2), 41-54.

- Fista, L., & Parjiyana, P. (2024). Pelaksanaan Fungsi Kepala Desa Dalam Pembinaan Kemasyarakatan Di Desa Kuantan Babu Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu. *Journal of Public Administration Review*, 1(1), 26-36.
- Parjiyana, P., Nazir, Y., Wedayanti, M. D., & Mardianto, M. (2019). Peranan Kepala Dusun Dalam Membantu Tugas Kepala Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 5(2), 198-205.
- Afhisssa, C., & Parjiyana, P. (2017). Analisis Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Pimpinan di Balai Diklat Lingkungan Hidup dan Kehutanan (BDLHK) Pekanbaru. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 3(2), 207-223.
- Marcella, A., & Parjiyana, P. (2018). ANALISIS PELAYANAN UMUM DI PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) TIRTA INDRA KABUPATEN INDRAGIRI HULU. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 4(1), 17-35.
- Suriani, L., Nisa, K., & Affandi, L. H. (2023). Pelaksanaan Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila Tema Gaya Hidup Berkelanjutan di Sekolah Dasar. *Jurnal Educatio FKIP UNMA*, 9(3), 1458-1463.
- Suriani, L., & Lumintang, G. (2018). Pengaruh Kompensasi, Disiplin Kerja Dan Etika Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Di Pt. Transindo Jaya Bahari Maumbi Manado. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 6(4).
- Suriani, L., & Sidabutar, O. J. (2019). Kualitas Pelayanan Dan Peraturan Tata Tertib Perpustakaan Terhadap Kepuasan Pemustaka Di Perpustakaan Soeman Hs. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 5(2), 190-197.
- Handrian, E., Rosmita, R., & Suriani, L. (2023). Inclusive Development for Marginal Group Street Trader in Tembilahan Indragiri Hilir District. *Jurnal Administrasi Publik*, 14(1).
- Syafitri, I., & Suriani, L. (2019). Peran Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan Di Desa Sejati Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 5(1), 44-54.
- Hamim, S., Vianda, L., & Pitaloka, S. (2020). Penerapan Prinsip Prinsip Pelayanan Publik Di Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk Dan Catatan Sipil Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Pekanbaru. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 6(1), 1-10.
- Adnan, I. M., & Hamim, S. (2013). Administrasi, Organisasi Dan Manajemen Suatu Ilmu, Teori, Konsep Dan Aplikasi.
- Hamim, S. (2005). Sistem Perencanaan Strategis Dalam Pembangunan.
- Adnan, I. M., & Hamim, S. (2013). Administrasi, Organisasi Dan Manajemen Suatu Ilmu, Teori, Konsep Dan Aplikasi.
- Adnan, I. M., & Hamim, S. (2014). Filsafat Ilmu, Ilmu Pengetahuan dan Penelitian.
- Andry, H., & Yussa, A. T. (2015). Perilaku dan Etika Administrasi Publik. Pekanbaru: Marpoyan

- Handrian, E., & Andry, H. (2020). Sustainable Development Goals: Tinjauan Percepatan Pencapaian di Provinsi Riau. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 6(1), 77-87.
- Andry, H. (2017). Pelayanan Publik Pengurusan Izin Mendirikan Bangunan Di Kecamatan Mandau Oleh Dinas Tata Kota, Tata Ruang Dan Pemukiman Kabupaten Bengkalis. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 3(1), 66-79.
- Andry, H., & Zulkifli, Z. (2023). Evaluasi pengelolaan parkir oleh dinas perhubungan kota pekanbaru. *Eqien-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 12(02), 194-205.
- Andry, H., Herman, H., & Rahmah, J. (2023). PELAKSANAAN KOORDINASI DINAS KESEHATAN KOTA PEKANBARU DAN BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA PEKANBARU DALAM PENGHAPUSAN ASET KENDARAAN DINAS OPERASIONAL KHUSUS (AMBULANCE). *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (JISIP)*, 12(1), 18-28.
- Abdullah, S., Hamim, S., & Ermayuna, S. (2021). Stretegi Pembangunan Pertanian Tanaman Pangan Di Lahan Gambut Desa Pulau Palas Kabupaten Indragiri Hilir. *Pascasarjana Ilmu Administrasi Universitas Islam Riau*, 1-83.
- Anggara, B., & Abdullah, S. (2017). Pelaksanaan Pengawasan Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kota Pekanbaru Dalam Pendistribusian Gas Lpg 3 Kg Di Kota Pekanbaru. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 3(2), 248-261.
- Ariswanto, N. S., & Abdullah, S. (2016). Analisis Pelaksanaan Kewenangan Badan Permusyawaratan Desa (Bpd) Di Desa Berumbung Baru Kecamatan Dayun Kabupaten Siak. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 2(2), 197-215.
- Herman, H., Kartius, K., Abdullah, S., & Hasibuan, C. R. (2024). Collaborative Governance In Overcoming Unemployment in Bengkalis Regency, Riau Province. *PERSPEKTIF*, 13(1), 164-173.
- Abdullah, S., & Safri, I. (2023). Pemberdayaan Masyarakat Dalam Mengelola Potensi Masyarakat Desa Kampung Panjang Kabupaten Kampar. *Masyarakat Berdaya dan Inovasi*, 4(2), 242-248.
- Nurmasari, N., & Al Hafis, R. I. (2019). Desentralisasi Asimetris: Kemiskinan ditengah kelimpahan otonomi khusus papua. *JPAP: Jurnal Penelitian Administrasi Publik*, 5(2), 1180-1192.
- Nurmasari, N., Komalasari, E., Muliando, B., Nurman, N., & Amrillah, M. F. (2024). PELATIHAN INOVASI BANK SAMPAH PLASTIK UNTUK PENINGKATAN PENDAPATAN EKONOMI MASYARAKAT DI BANK SAMPAH PUAN SARI MANDIRI. *Jurnal ADAM: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 3(1), 35-40.
- Kurniawan, R., & Nurmasari, N. (2017). Analisis Kinerja Pegawai Pada Bidang Pelayanan Dan Informasi Di Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Siak. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 3(1), 122-134.
- Afringgo, R., Nurmasari, N., & Zubaidah, E. (2021). Efektifitas E-Warong sebagai Sarana

Pengintegrasian Tujuan Program Keluarga Harapan pada Kelompok Target KUBE Berkah Harapan di Kota Pekanbaru. *Jurnal Ranah Publik Indonesia Kontemporer (Rapik)*, 1(1), 22-29.

- Nurmasari, N., & Wedayanti, M. D. (2018, August). HUMAN RESOURCE MANAGEMENT CIVIL SERVANT EMPLOYEES IN THE FRAMEWORK OF REFORM BUREAUATION IN RIAU PROVINCE. In *ICSScE 2018*.
- Herman, H., Suriani, L., & Farisha, N. (2021). Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Sampah Pada Pasar Milik Pemerintah Kota Pekanbaru. *Publikauma: Jurnal Administrasi Publik Universitas Medan Area*, 9(2), 81-90.
- Herman, H. (2019). Pelaksanaan Corporate Social Responsibility Oleh Stakeholders Primer Dan Skunder Di Riau. *Jurnal Ilmiah Manajemen Publik Dan Kebijakan Sosial*, 2(2).
- Herman, H., & Novarizal, R. (2017). Faktor-faktor ideal perusahaan dalam pelaksanaan CSR (Corporate Social Responsibility). *Sisi Lain Realita*, 2(2), 39-53.
- Nengsih, I. A., & Herman, H. (2019). Strategi Pelayanan Izin Praktek Dokter Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Pekanbaru. *Asketik*, 3 (2), 163–175.
- Novarizal, R., & Herman, H. (2019). Pengamanan Lembaga Masyarakat Terhadap Kemungkinan Terjadinya Pelarian (Studi Kasus Lapas Kelas II A Pekanbaru): Universitas Islam Riau. *Sisi Lain Realita*, 4(1), 90-102.
- Suri, D. M. (2017). Analisis faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan penertiban dan pembinaan gelandangan dan pengemis di kota pekanbaru. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 3(1), 89-101.
- Suri, D. M., & Nurmandi, A. (2021, July). Deep learning methods as a detection tools for forest fire decision making process fire prevention in Indonesia. In *International Conference on Human-Computer Interaction* (pp. 177-182). Cham: Springer International Publishing.
- Suri, D. M., Nurmandi, A., Qodir, Z., & Al Fadhat, F. (2021). Narrative Policy Framework: The Role Of Media Narrative Towards Forest And Land Fire Policy In Indonesia. *Universitas Muhammadiyah Yogyakarta*.
- Hildawati, H., & Suri, D. M. (2020). Potensi UEK-SP Kelurahan Rimba Sekampung Untuk Transformasi Menjadi Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Di Kota Dumai. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 6(1), 24-42.
- Yogia, M. A., & Suri, D. M. (2020). Implementasi Kebijakan Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Usaha Ekonomi Kelurahan. *Sosio Konsepsia*, 9(03), 247-256.
- Al Hafis, R. I., & Yogia, M. A. (2017). Abuse of power: Tinjauan terhadap penyalahgunaan kekuasaan oleh pejabat publik di Indonesia. *Publika: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 3(1), 80-88.
- Hafis, A., Imam, R., Hakim, A., & Haryono, B. S. (2014). Aktor Pelaksana Pengelolaan Transportasi Publik Perkotaan (Studi Kasus Bus Trans Metro Di Kota Pekanbaru). *Jurnal Wacana*, 16(4), 171-178.

- Al Hafis, R. I. (2018). Pembangunan Daerah Perbatasan Yang Terabaikan: Kajian Perbatasan Kecamatan Rupa Utara Kabupaten Bengkalis–Selat Malaka. *Gema Publica*, 3(2), 111-119.
- Al Hafis, R. I., Warsono, H., Larasati, E., & Purnaweni, H. (2021). The paradox of collaborative governance in leprosy rehabilitation in Central Java. *Management and Entrepreneurship: Trends of Development*, 3(17), 55-67.
- Al Hafis, R. I., Wardana, D., Setiawati, S., & Putra, A. I. (2024). Proses Collaborative Governance untuk Mengurangi Dampak Abrasi. *Kaganga: Jurnal Pendidikan Sejarah dan Riset Sosial Humaniora*, 7(1), 521-529.
- Lubis, E. F., & Zubaidah, E. (2020). Efektivitas Program Keluarga Harapan Dalam Penanggulangan Kemiskinan. *Societas: Jurnal Ilmu Administrasi dan Sosial*, 9(2), 88-99.
- Zubaidah, E., & Lubis, E. F. (2021). Inovasi Layanan Aplikasi e-Samsat Dalam Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Di Provinsi Riau. *Jurnal Niara*, 14(2), 120-125.
- Zubaidah, E. (2018). Analisis Manajemen Perkantoran Dalam Meningkatkan Kinerja Pegawai PT. Pegadaian Persero Kantor Wilayah II Pekanbaru. In *Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Administrasi Perkantoran*.
- Zubaidah, E., Nurmandi, A., Pribadi, U., Hidayati, M., & Lubis, E. F. (2022, March). The Factors Influencing the Community to Use E-Service in Pekanbaru City, Indonesia. In *International Conference on Public Organization (ICONPO 2021)* (pp. 310-318). Atlantis Press.
- Zubaidah, E. (2016). MANAJEMEN PANTI ASUHAN DALAM PERSPEKTIF HENRI FAYOL:(STUDY KASUS PANTI ASUHAN USMAN BIN AFFAN). *VALUTA*, 2(1), 130-139.
- Wedayanti, M. D., Nurmandi, A., Jubba, H., & Pulungan, B. I. (2022). Political Interaction Strategy Corporate Social Responsibility of PT Riau Andalan Pulp and Paper in Riau Province, Indonesia. *International Journal of Sustainable Development & Planning*, 17(8).
- Wedayanti, M. D., & Susanti, H. (2019). Pengembangan Pariwisata Berbasis Masyarakat (CBT) Menggunakan Kontribusi Corporate Social Responsibility (CSR) di Pekanbaru Provinsi Riau. *WEDANA: Jurnal Kajian Pemerintahan, Politik dan Birokrasi*, 5(2), 32-37.
- Wedayanti, M. D., Nurmandi, A., Jubba, H., & Juliana, S. (2021, January). Implementation of Corporate Social Responsibility in PT. Riau Andalan Pulp and Paper in Pelalawan District, Riau Province. In *INCEESS 2020: Proceedings of the 1st International Conference on Economics Engineering and Social Science, InCEESS 2020, 17-18 July, Bekasi, Indonesia* (p. 71). European Alliance for Innovation.
- Wedayanti, M. D., & Zulkifli, Z. (2015). Pelaksanaan Pengawasan Barang dan Jasa Beredar Oleh Seksi Perlindungan Konsumen Pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 1(1), 52-72.

- Parjiyana, P., Nazir, Y., Wedayanti, M. D., & Mardianto, M. (2019). Peranan Kepala Dusun Dalam Membantu Tugas Kepala Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 5(2), 198-205.
- Lubis, E. F., & Zubaidah, E. (2020). Efektivitas Program Keluarga Harapan Dalam Penanggulangan Kemiskinan. *Societas: Jurnal Ilmu Administrasi dan Sosial*, 9(2), 88-99.
- Lubis, E. F., & Zubaidah, E. (2019). Efektivitas Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga (PMB-RW) Dalam Mewujudkan Prinsip Tridaya Di Kota Pekanbaru. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 5(2), 156-163.
- Lubis, E. F. (2015). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (Pnpm Mpd)(Studi Kasus: Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan Di Nagari Tanjung Betung Kabupaten Pasaman). *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 1(2), 304-317.
- Lubis, E. F., & Indira, T. T. (2023). PENGARUH STORE ATMOSPHERE TERHADAP KEPUASAN KONSUMEN PADA AYAM PENYET CINDELARAS BAGAN BATU KABUPATEN ROKAN HILIR. *PubBis: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Administrasi Publik dan Administrasi Bisnis*, 7(1), 1-9.
- Lubis, E. E. F. (2024). PELATIHAN PEMBUATAN SABUN CUCI PIRING UNTUK MENINGKATKAN TAMBAHAN PENDAPATAN PADA IBU-IBU KELOMPOK MELATI PUTIH DALAM PROGRAM KELUARGA HARAPAN DI KECAMATAN SUKAJADI KOTA PEKANBARU. *Multidisciplinary Indonesian Center Journal (MICJO)*, 1(1), 120-126.
- Herman, H., Kartius, K., Abdullah, S., & Hasibuan, C. R. (2024). Collaborative Governance In Overcoming Unemployment in Bengkalis Regency, Riau Province. *PERSPEKTIF*, 13(1), 164-173.
- Handrian, E., Rosmita, R., Suriani, L., & Kartius, K. (2022). Reformasi Badan Usaha Milik Desa Kesumbo Sejahtera di Desa Kesumbo Ampai Kabupaten Bengkalis. *Jurnal Mandala Pengabdian Masyarakat*, 3(2), 231-237.
- Kurniawan, A. (2020). Pengaruh Kepemimpinan Diri Sendiri Terhadap Sikap Wirausaha Pada Usaha Makanan Tradisional Di Desa Palung Raya Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 6(2), 179-191.
- Kurniawan, A., Rezki, D., & Riau, U. I. (2023). Collaborative Governance Dalam Menanggulangi Banjir di Kota Sungai Penuh Collaborative Governance in Overcoming Floods in the City of Sungai Penuh. *Jurnal Penelitian Administrasi Publik*, 9(1), 1-18.
- TARMIZI, A., KURNIAWAN, A., ADERISKA, M., & AFRIZAL, T. (2022). Analysis of Quality Electronic Identity Card Service in Sub-District West Meral of Karimun District, Riau Islands (Integrated Sub-District Administration Service Model "Paten"). *International Journal of Society, Development and Environment in the Developing World*, 6, 62-72.
- Tarmizi, A., & Kurniawan, A. (2017). Model Administrasi Pribumi Masyarakat Adat Melayu

Petalangan di Desa Sialang Godang Kabupaten Pelalawan Riau. In *Seminar Nasional "Mitigasi dan Strategi Adaptasi Dampak Perubahan Iklim di Indonesia* (pp. 165-177).

- Yusa, A. T., Andry, H., & Kurniawan, A. (2016). Restorasi Paradigma KUD:" Pendekatan Teori Organisasi Dalam Merebut Peluang MEA".
- Yunisman, Y., Salioso, H., Febrianto, S., Prayuda, R., & Mardatillah, A. (2022). Analysis of quality of animal health services by veterinary medical and veterinary paramedic services in food security and agricultural agency of Rokan Hilir Regency. *International Journal of Health Sciences*, 14(3), 1030-1046.
- Larasati, D., Indrastuti, S., Salioso, H., Yussa, H. A., & Suri, D. M. (2022). Analysis of the effect of job satisfaction and job motivation on the performance of cleaning officers at the environmental service agency Rokan Hilir district Indonesia. *International Journal of Health Sciences*, 6(4), 573-588.
- Salioso, H. (2016). ASN, OTDA, Politik Pilkada Serentak dan Korupsi di Indonesia. *SISI LAIN REALITA*, 1(1), 01-07.
- Adha, M. L., & Salioso, H. (2024). KINERJA ORGANISASI DI KANTOR PENCARIAN DAN PERTOLONGAN BASARNAS KELAS A PEKANBARU. *JURNAL KEMUNTING*, 5(1), 1-16.
- Askarial, A., Rinaldi, K., & Salioso, H. (2016). Kota Dumai Dalam Pidato Seorang Walikota.
- Siagian, Sondang P. 2008. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Binapura.
- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Sutarto. 1993. *Pengertian, Kedudukan dan Perincian Ilmu Administrasi*. Yogyakarta: Liberty
- Sutedi, Adrian. 2010. *Hukum Administrasi Publik*. Jakarta. Sinar Grafika
- Syaffie, Inu Kencana. 2016. *Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia*. Bandung: Bumi Aksara
- Syafrie, Wirman. 2012. *Studi Tentang Administrasi Publik*. Jakarta: Erlangga
- Thoha, Miftah. 1984. *Dimensi-dimensi Prima Ilmu Administrasi Negara*. Jakarta: Rajawali.
- Wiludjeng, Sri. 2007. *Pengantar Manajemen*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Zulkifli, Awang, A., & Dkk. (2013). *Buku Pedoman Penulisan Usulan Penelitian Skripsi dan Kertas Kerja Mahasiswa*. Fisipol UIR.
- Zulkifli & Nurmasari. 2015. *Pengantar Manajemen*. Pekanbaru: Marpoyan Tujuh.

Regulasi:

Undang-undang Republik Indonesia 1945.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah.

Peraturan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis.

Muhammad Akbar Utama dan Hendry Andry

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pelaksanaan Reduce, Reuse dan Recycle melalui Bank Sampah.

Peraturan Daerah Kota Pekanbaru No. 8 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah.